

# RENCANA KERJA

BPKAD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

KOTA YOGYAKARTA 2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top down/bottom up*.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2020 penyusunan Rencana kerja OPD masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun untuk tahun 2024 penyusunan Rencana Kerja OPD disusun berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, serta mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tidak hanya pada perencanaan saja, permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Fokus utamanya yaitu untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju "SINGLE CODEBASE".

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah menyusun

Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta dalam rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu untuk Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang . Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan .yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kota Yogyakarta adalah :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
- 2) Meningkatkan pendapatan pajak daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. LATAR BELAKANG**

##### **1.2. LANDASAN HUKUM**

##### **1.3. MAKSUD TUJUAN**

##### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2022) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
2.2.	ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3.	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
2.4.	REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.5.	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP
	Lampiran-Lampiran

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan pajak daerah yang mempunyai beberapa program antara lain :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2) Administrasi Keuangan**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

**4) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

**2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### **3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

### **1) Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah
- f. Penilaian Barang Milik Daerah
- g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- j. Penagihan Pajak Daerah
- k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### **2.1.a. Evaluasi kegiatan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan :

1. Dilaksanakan koordinasi intern, monitoring, evaluasi, konsolidasi baik keuangan maupun fisik kegiatan yang dilakukan setiap sebulan.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang ada.
3. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah dengan melaksanakan E-Tax, E-SPTPD, dan monitoring kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara online.

#### **2.1. b. Analisa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022**

Analisa akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai SKPD penghasil melalui pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Capaian kinerja BPKAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat kedalam yaitu mendukung tugas pokok dan fungsi berupaya

untuk selalu meningkatkan profesionalisme dibidang pengelolaan keuangan dan aset dengan capaian kinerja 95,07%, realisasi ini melebihi dari target 94,08% atau sebesar 101,05%, selain itu nilai pendapatan asli daerah tercapai sebesar Rp725.577.542.997,58 melebihi target Rp634.171.754.454,00 atau sebesar 114,41%.

2. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil.

### **2.1.c. Analisa Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan. Realisasi keuangan tidak sesuai d
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala pengukuran ordinal rata-rata capaian indikator output adalah 95,07% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output kegiatan sesuai yang ditargetkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022 yang dituangkan dalam Tabel 2.1.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berisi kajian capaian kinerja pelayanan SKPD terdapat dengan indikator :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua indikator tersebut dituangkan dalam Tabel 2.2.

## **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD**

1. Perlunya peningkatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .
2. Perlunya penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan wajib pajak sekaligus pengawasan dan pembinaannya.
3. Perlunya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
5. Perlunya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga perlu adanya kompetisi antar kabupaten /kota dalam peningkatan pajak daerah.
6. Perlunya peningkatan penataan aset daerah.
7. Perlu penyusunan Database aset daerah guna optimalisasi pemanfaatan aset daerah
8. Perlu adanya integrasi aplikasi keuangan dan aplikasi aset guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta integrasi pada Sistem Pajak Daerah yang akan memudahkan dalam pelayanan.

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Melalui Program yang telah disusun :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

## **2) Administrasi Keuangan**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

## **3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

## **4) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

## **5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## **7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

#### **2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

##### **1) Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah
- f. Penilaian Barang Milik Daerah
- g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **5. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- j. Penagihan Pajak Daerah
- k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini sudah dikomunikasikan dengan SKPD baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Acara ini dilaksanakan melalui Forum OPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.a. Optimalisasi sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka Kebijakan Nasional di daerah perlu adanya prioritas sasaran, termasuk Sumber Daya Manusia/tenaga yang semakin berkurang dikarenakan banyak Pegawai yang purna tugas dan tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai. Berdasarkan anjab kebutuhan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang ternyata baru terpenuhi 134 (seratus tiga puluh empat) orang atau 46,53%.(empat puluh enam koma lima puluh tiga persen).

Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang ketugasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta perlu adanya pemenuhan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja, sumber daya aparatur pemerintahan dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

##### **3.1.b. Penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparatur dalam pengelolaan dan aset daerah dilakukan secara profesional, yang efektif, rasional sesuai kebutuhan anggaran yang diperlukan, transparan dan akuntabel.**

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.2.1. Tujuan**

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Rumusan tujuan perangkat daerah dapat dihitung dengan formula indikator yang diukur dengan prosentase.

##### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset meningkat
2. Pendapatan asli daerah tercapai

### **3.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2024**

A. BPKAD Kota Yogyakarta mengampu 4 (empat) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Internal dan 3 (tiga) Program eksternal sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2) Administrasi Keuangan**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

##### **3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

##### **4) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

## **5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## **7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

### **2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan

Lembaga Keuangan Bukan Bank

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### **3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

## **3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

### **1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah
- f. Penilaian Barang Milik Daerah
- g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang

Milik Daerah

- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- j. Penagihan Pajak Daerah
- k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Lokasi Program dan Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BPKAD Kota Yogyakarta menerima beberapa usulan secara langsung dari masyarakat melalui musrenbang.

C. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai anggaran kinerja dan usulannya dari masing-masing kegiatan masih dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, dan ada beberapa pengalihan output ke SKPD lain karena tidak sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Misi ke 6 (tujuh) yaitu: **"Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih"**

Sesuai dengan tupoksi OPD yaitu mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan terutama untuk pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta harus senantiasa melakukan perbaikan dalam penentuan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan rasional serta akuntabel untuk kepentingan pemerintah daerah, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah :

- Dapat menyajikan Laporan Keuangan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meraih penilaian hasil audit BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian
- Meningkatkan kualitas SDM untuk penataan sistem prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja para pejabat dalam mengampu kegiatan yang dilaksanakan sesuai program dan kegiatan serta tatakala yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 terdapat pada Tabel 3.1.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja**

Usulan Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta telah dituangkan dalam masing-masing program sesuai indikator per program dan kegiatan serta output per sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tatakata dan target yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan dan merupakan suatu perencanaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bagian penting dalam pencapaian sasaran pembangunan Kota Yogyakarta dan mendukung visi dan misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 akan dihadapkan pada beberapa tantangan dalam rangka pemulihan ekonomi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan . Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan upaya-upaya bersama dari semua pihak secara komprehensif dalam rangka meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rak .



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>70.315.178.237,00</b>
	<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>			<b>70.315.178.237,00</b>
<b>1.</b>	<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Nilai)</i>	<b>A</b>	<b>45.930.981.598,00</b>
	<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)</i>	<b>14</b>	<b>3.432.000,00</b>
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	990.000
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	2	330.000
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	2	330.000
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	2	330.000
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	2	330.000

5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	3	792.000
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	1	330.000
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b><i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)</i></b>	<b>22</b>	<b>37.342.308.500,00</b>
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	175	37.340.163.500
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12	660.000
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)</i>	11	165.000
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1	165.000
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)</i>	1	330.000
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	12	660.000
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)</i>	1	165.000

	<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)</b>	<b>4</b>	<b>1.980.000</b>
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	12	660.000
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	1.320.000
	<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)</b>	<b>12</b>	<b>898.716.335,00</b>
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1	12.534.500,00
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	3	492.085.035,00
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>	1	23.341.800,00
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	5	167.325.000,00
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12	155.600.000,00
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	12	47.830.000,00
	<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	2	0

	<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b><i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)</i></b>	<b>12</b>	<b>7.296.981.664,00</b>
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12	215.440.000,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12	6.600.600.000,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12	480.941.664,00
	<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b><i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)</i></b>	<b>95</b>	<b>387.563.099,00</b>
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	1	36.100.000,00
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	32	174.020.000,00
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	50	92.400.000,00
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	10	7.500.000,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	2	77.543.099,00
<b>2.</b>	<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b><i>Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran (%)</i></b>	<b>100</b>	<b>16.815.857.315,00</b>

			<b>Persentase penyerapan belanja daerah (%)</b>	<b>87,20</b>	
			<b>Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik (%)</b>	<b>95,12</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen rencana anggaran (Dokumen)</b>	<b>89</b>	<b>157.554.496,00</b>
			<b>Jumlah dokumen pengendalian anggaran (Perangkat Daerah)</b>	<b>88</b>	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen )</i>	2	8.225.000
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen )</i>	2	8.225.000
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )</i>	43	6.600.000
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )</i>	43	6.600.000
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )</i>	43	3.025.440
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )</i>	43	3.025.440
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen )</i>	4	66.997.000
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen )</i>	2	48.295.000
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen )</i>	2	6.561.616

	<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah (Dokumen)</b> <b>jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah (Laporan)</b>	<b>220</b> <b>92</b>	<b>16.434.054.819,00</b>
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )</i>	2	16.241.964.819,00
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)</i>	1	660.000,00
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen )</i>	8	660.000,00
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen )</i>	1	3.660.000,00
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen )</i>	12	45.652.000,00
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen )</i>	2	3.575.000,00
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P</i>	1	2.783.000,00

5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen )</i>	1	1.540.000,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen )</i>	12	123.300.000,00
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen )</i>	5	5.640.000,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)</i>	51	4.620.000,00
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>&amp;Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah&amp; (Laporan)</b> <b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dokumen)</b> <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)</b> <b>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina (BLUD)</b>	<b>12</b> <b>57</b> <b>6</b> <b>23</b>	<b>224.248.000,00</b>

	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)</i>	12	83.324.000,00
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)</i>	17	2.280.000,00
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)</i>	65	9.108.000,00
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen )</i>	2	35.776.000,00
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen )</i>	6	4.224.000,00
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)</i>	41	62.890.000,00
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)</i>	23	26.646.000,00
3.	5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b><i>Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik (%)</i></b>	<b>95,12</b>	<b>5.603.758.324,00</b>

5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal (Dokumen)</i>	12	5.603.758.324,00
		<i>&amp;Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah&amp; (Laporan)</i>	17	
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (OPD)</i>	41	
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	14	
		<i>Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)</i>	5	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )</i>	1	74.097.000,00
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan an Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun (Dokumen )</i>	1	83.289.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )</i>	1	1.196.025.820,00
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen )</i>	1	7.658.000,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	2	197.487.032,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	4	2.355.543.920,00

	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	6	327.500.000,00
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan )</i>	1	496.635.000,00
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )</i>	2	753.382.024,00
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	12	33.780.528,00
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)</i>	41	78.360.000,00
4.	<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b><i>Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian (Rp/Tahun)</i></b>	<b>29.313.578.907</b>	<b>1.964.581.000,00</b>
			<b><i>Nilai pendapatan Pajak Daerah (Rp/Tahun)</i></b>	<b>481.723.900.000</b>	
			<b><i>Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar (Rp/Tahun)</i></b>	<b>16.000.000.000</b>	
	<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b><i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi (Dokumen)</i></b>	<b>16</b>	<b>1.964.581.000,00</b>

			<b>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah (Berkas)</b>	<b>40255</b>	
			<b>Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)</b>	<b>12</b>	
			<b>Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan. (Ketetapan)</b>	<b>114253</b>	
			<b>Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)</b>	<b>1032</b>	
			<b>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Laporan)</b>	<b>12</b>	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )</i>	2	5.522.000
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)</i>	1	92.090.000
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )</i>	1	235.903.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)</i>	12	60.179.000
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)</i>	12	266.172.000

5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )</i>	60	7.150.000
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)</i>	112000	5.049.000
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)</i>	40255	367.212.000
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )</i>	12	73.110.000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)</i>	2	323.945.000
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)</i>	1000	111.805.000
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )</i>	12	392.508.000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)</i>	11	23.936.000
<b>J U M L A H</b>				<b>70.315.178.237,00</b>





























<b>eksi</b>	<b>Catatan</b>
<b>Tahun 2023</b>	<b>Analisis</b>
(12)	(13)

**Tabel 2.3**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis K		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	37,197,942,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran  Persentase penyerapan belanja daerah  Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	100%  87.10%  95.12%	21,007,439,048	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran  Persentase penyerapan belanja daerah  Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	92.68%	2,907,701,048	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah  Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian  Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	#####  28,768,474,190  16,000,000,000	3,760,411,714	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah  Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian  Nilai tunggakan pajak daerah terbayar
<b>Jumlah Anggaran</b>					<b>64,873,493,810</b>			

ebutuhan		
Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(10)	(11)	(12)
100%	37,197,942,000	
100%	21,007,439,048	
87.10%		
95.12%		
92.68%	2,907,701,048	
444,281,800,000	3,760,411,714	
28,768,474,190		
16,000,000,000		
<b>Jumlah usulan</b>	<b>64,873,493,810</b>	



**Tabel 2.4**

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>NIHIL</b>					